

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan berpengaruh luas terhadap kehidupan manusia. Badan Pusat Statistik mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar yang minimal untuk hidup dengan layak. Lebih lanjut kemiskinan diartikan sebagai keadaan yang berada di bawah garis nilai *standart minimum*, baik yang berkaitan dengan makanan maupun *non makanan*, yang dikenal sebagai garis kemiskinan atau batas kemiskinan (Ferezagia, 2018).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2021 hingga tahun 2025 terdapat penurunan yang cukup konsisten setiap tahunnya. Tahun 2025 tercatat sebesar 100,13 ribu jiwa penduduk miskin atau sekitar 6,13 persen yang menunjukkan bahwa adanya penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 130,93 ribu jiwa penduduk miskin atau sekitar 8,07 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir penduduk miskin di Banyuwangi mengalami penurunan yang konsisten baik dari jumlah maupun presentase penduduk miskinnya (BPS, 2025).

Tabel 1. 1 Garis, Jumlah, Perubahan dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi 2020-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Perubahan Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Presentasi Penduduk Miskin (%)
2021	387.084	130,93	0,55	8,07
2022	414.879	122,01	-8,92	7,51
2023	448.928	119,52	-2,49	7,34
2024	470.713	106,61	-12,91	6,54
2025	485.012	100,13	-6,48	6,13

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025.

Melihat gambaran kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi diatas, meskipun terdapat penurunan yang konsisten dalam jumlah penduduk yang masih tergolong miskin, namun garis kemiskinan justru mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat semakin tinggi seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai

pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin (BPS Banyuwangi, 2025).

Selain itu, masih banyak masyarakat yang hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan, yang sering dikenal sebagai kelompok hampir miskin. Kelompok hampir miskin ini termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang sangat rentan atau mudah mengalami kemiskinan. Dalam kelompok ini, jika terjadi sedikit masalah ekonomi, mereka dapat dengan cepat terjatuh kembali ke dalam garis kemiskinan (Hayati, 2018).

Tabel 1. 2 Kategori Desil Kemiskinan

Desil	Kategori	Ciri Umum
1	Miskin ekstrem bawah	Lantai tanah, tanpa MCK, konsumsi <Rp350rb/kap/bln
2	Miskin ekstrem atas	Hunian sederhana, sumber air tidak layak
3	Miskin tidak ekstrem	Rumah semi-permanen, penghasilan tidak menentu
4	Rentan miskin bawah	Pekerja informal, tabungan minimal
5	Rentan miskin atas	Dekat garis kemiskinan, bisa naik-turun desil
6-7	Menengah	Pekerja formal/semi-formal, punya tabungan kecil
8-9	Menengah atas	Kepemilikan aset signifikan, akses pendidikan baik
10	Sejahtera/kaya	Aset besar, penghasilan tinggi, pendidikan tinggi

Sumber : Sobat Bansos (2024).

Pemerintah menggunakan sistem desil sebagai salah satu indikator untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Fadilla (2017), desil merupakan pembagian rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Semakin rendah nomor desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan rumah tangga, sedangkan semakin tinggi nomor desil menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Rumah tangga yang tergolong miskin umumnya berada pada desil 1 hingga desil 4, dengan desil 1 dikategorikan sebagai rumah tangga miskin ekstrem yang memiliki rata-rata pengeluaran kurang dari Rp350.000 per kapita per bulan. Kelompok rumah tangga tersebut umumnya mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, kondisi rumah yang sederhana, keterbatasan akses terhadap sanitasi dan air bersih, kepemilikan aset yang terbatas, serta pekerjaan dengan pendapatan yang tidak

tetap menjadi karakteristik yang umum dijumpai pada rumah tangga miskin (Sobat Bansos, 2024).

Permasalahan kemiskinan tersebut merupakan salah satu tantangan terbesar dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor pembangunan, pemerataan hasil pembangunan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara menyeluruh, diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan distribusi pendapatan yang merata (Purnama, 2017).

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera yang disingkat menjadi PETI KOIN BERMANTRA sebagai salah satu langkah dalam mengatasi kemiskinan. PETI KOIN BERMANTRA ini merupakan pengembangan dan keberlanjutan dari *Anti Poverty Program* (APP) yang sudah berjalan selama 17 tahun di 17 Kabupaten lokasi APP di Jawa Timur. *Anti Poverty Program* atau biasa disingkat dengan APP merupakan bagian dari kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi produktif. Program ini diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa timur untuk memberdayakan ekonomi di Desa yang miskin namun memiliki potensi produktif (Hamzah *et al.*, 2024).

Kabupaten Banyuwangi terpilih sebagai lokasi pelaksanaan program PETI KOIN BERMANTRA karena daerah ini masih memiliki kelompok masyarakat produktif yang tergolong miskin, namun memiliki potensi ekonomi yang besar terutama di sektor pertanian dan perikanan yang dinilai mampu dikembangkan menjadi usaha yang lebih menguntungkan untuk pembangunan usaha masyarakat, sehingga dinilai siap dalam menjalankan program pemberdayaan tersebut. Diartho *et al.*, (2020), menyatakan bahwa di Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa potensi di masing-masing kecamatan yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan, sektor-sektor tersebut mencakup sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor peternakan.

Pelaksanaan program di Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan secara bertahap sejak program APP dan dilanjutkan dengan program PETI KOIN BERMANTRA. Menurut data Pokmas PETI KOIN BERMANTRA di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2021 hingga sampai pada tahun 2025, terdapat 13 Pokmas dengan total jumlah anggota sebanyak 151 anggota yang tersebar di wilayah Kecamatan Srono, Kecamatan Muncar, dan Kecamatan Glemore. Setiap Pokmas memiliki jumlah anggota dan jenis usaha ekonomi produktif yang berbeda, dengan jumlah anggota yang berkisar antara 4 sampai 20 anggota, yang ditentukan berdasarkan mekanisme program.

Kecamatan Srono dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi lokasi pelaksanaan program PETI KOIN BERMANTRA dengan jumlah kelompok masyarakat atau Pokmas penerima manfaat yang cukup besar dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 7 kelompok masyarakat (Pokmas) dengan total jumlah anggota sebanyak 83 anggota Bappeda Kabupaten Banyuwangi, (2025). Wilayah Kecamatan Srono memiliki berbagai potensi ekonomi produktif yang beragam, seperti pertanian, perikanan, hingga usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pada pelaksanaan program PETI KOIN BERMANTRA pemerintah daerah berupaya untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif yang berbasis kelompok. Program ini tidak hanya memberikan dukungan modal, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan manajerial, akses pasar, serta penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (Pokmas) yang menjadi penerima manfaat, dengan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan, program ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan mendorong keberlanjutan usaha yang dikelola oleh masyarakat di tingkat lokal (Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025).

Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala dan permasalahan yang kompleks sehingga menghambat optimalisasi program di lapangan, seperti lemahnya manajemen kelembagaan Pokmas, terbatasnya akses terhadap pasar, proses produksi yang kurang efisien, pendampingan yang belum optimal dari pihak terkait, serta skala usaha yang belum berkembang secara

signifikan Bappeda Kabupaten Banyuwangi,(2025). Terdapat juga fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa tidak semua anggota kelompok yang terlibat dalam program ini dapat terus berpartisipasi. Di Kecamatan Srono, terdapat beberapa anggota Pokmas yang berusia lanjut sehingga mengalami keterbatasan dalam mengikuti rangkaian kegiatan program secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian peserta tidak dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh fasilitator maupun dalam pemanfaatan alat bantuan yang telah disediakan karena keterbatasan kemampuan fisik dan aktivitas. Selain itu, ditemukan pula bahwa beberapa jenis bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha Pokmas, sehingga pemanfaatannya kurang optimal dan sebagian alat bantuan cenderung tidak digunakan atau menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, masih diperlukan strategi optimalisasi dalam implementasinya agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi kelembagaan Pokmas, proses produksi, pemasaran, pendampingan, dan skala usaha (keberlanjutan) pada program PETI KOIN BERMANTRA di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana strategi optimalisasi pelaksanaan program PETI KOIN BERMANTRA agar pelaksanaan program tersebut dapat mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daya saing secara berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kondisi kelembagaan Pokmas, proses produksi, pemasaran, pendampingan, dan skala usaha (keberlanjutan) pada program PETI KOIN BERMANTRA di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.
2. Merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaan program PETI KOIN BERMANTRA agar pelaksanaan program tersebut dapat mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daya saing secara berkelanjutan

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi akademis sebagai referensi dalam kajian pemberdayaan masyarakat dan perumusan strategi optimalisasi program.
2. Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan Pokmas dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program PETI KOIN BERMANTRA guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing berkelanjutan.

